

BAB V PEMBAHASAN

A. Historiografi Akuntansi pada Masa Kerajaan Mataram Islam dalam Paradigma *New Accounting History*

Historiografi akuntansi pada masa Kerajaan Mataram Islam dalam paradigma *new accounting history* diawali dengan meletakkan akuntansi yang menjadi praktik sosial. Berarti, bentuk akuntansi yang ada di waktu itu tidak dapat disamakan dengan bentuk praktik akuntansi yang ada pada abad ke-17 ataupun abad berikutnya yang jauh lebih kompleks seperti saat ini. Hal itu dikarenakan keadaan perekonomian dan sosial tidak sama. Di masa ini, praktik akuntansi yang dilaksanakan tidak mengacu kepada praktik akuntansi modern sebagaimana yang terdapat di kehidupan modern di mana produk akuntansinya berupa laporan keuangan.¹

Akuntansi pada masa ini ditelusuri dengan pengidentifikasian dan penafsiran dari sumber literatur yang memuat tentang Kerajaan Mataram Islam yang mungkin saja dari sumber literatur tersebut dapat ditemukan komponen yang menginterpretasikan akuntansi dalam paradigma *new accounting history* yang terdiri dari pencatatan, mekanisme pajak, pasar, penggunaan uang dan adanya pertukaran (barter). Adanya komponen tersebut dinilai penting dalam pengeimplementasian dan pembentukan akuntansi di masa kerajaan Mataram Islam.

Temuan komponen yang dapat menginterpretasikan akuntansi pada masa Kerajaan Mataram Islam yaitu terdiri dari mekanisme pajak, pasar, penggunaan uang dan pertukaran (transaksi) terlihat dari sumber-sumber literatur tentang Kerajaan Mataram Islam yang kemudian ditulis ulang sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Kerajaan Mataram Islam

Sejak tahun 1575 sampai dengan tahun 1755, kekuasaan raja dari Kerajaan Mataram Islam sifatnya adalah absolut. Kepala negaranya adalah seorang rajayang

¹ Sukoharsono and Lutfillah, "Accounting in the Golden Age of Singosari Kingdom : A Foucauldian Perspective."

menjadi penentu juga pelaksana undang-undang, beserta menjadi hakim. Selaku kepala negara, oleh rakyat, raja merupakan pemilik semua hal yang ada pada nanungan kekuasaannya.² Raja mempunyai kekuasaan dalam melakukan tindakan apa pun guna kepentingan kerajaan beserta semua isinya baik harta benda maupun kehidupan manusia. Namun, besarnya wewenang ataupun kekuasaan yang raja miliki pun diseimbangkan dengan tingginya kewajiban yang diterimanya. Kewajiban itu sebagai tindakan raja guna bersikap bijak dan bertindak adil untuk melaksanakan roda pemerintahan. Konsep kekuasaan Jawa seperti ini dikenal sebagai konsep keagunbinataran.³

Berdasarkan bahasa pedalangan diungkapkan *gung binathara bau dhendha nyakrawati*. Raja dianggap *wenang wisesa ing sanagari* (memiliki wewenang paling tinggi di penjuru negeri). Dia harus memiliki sifat *berbudi bawa leksana*, bijaksana (*wicaksana*), meluap budi luhur-mulia bersifat adil pada sesama (*ambeg adil para marta*), tugasnya menjaga ketentraman dan keteraturan hidup rakyat (*anjaga tata titi tentreming praja*), supaya terwujud suasana aman dan sejahtera (*karta tuwin raharja*).⁴

Absolutisme tersebut membuat sistem pemerintahan Kerajaan Mataram Islam sifatnya menjadi sentralistik. Sistem tersebut tidak berubah sejak berdirinya kerajaan, yang semua kebijakan ataupun pengendalian pemerintahannya ditetapkan dari pusat dengan raja yang menjadi pemimpin paling tinggi. Namun, walaupun sistem itu tidak mengalami perubahan, struktur pemerintahan masih berkembang, baik struktur perwilayahan di dalamnya ataupun dalam organisasi. Hal tersebut berhubungan dengan meluasnya daerah ekuasaan yang

² Z Munawar, "Pengelolaan Pajak Di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4, no. 1 (2020): 10–23, <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7251>.

³ G Moedjanto, "*Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*" (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 123.

⁴ Arif Budi Wuriyanto, "Gung Binatara: Kekuasaan Dan Moralitas Jawa," *Jurnal Ilmiah Bestari* 32(XIV) (2001): 47–52.

membutuhkan kebijakan sebagai penentuan berjalannya roda pemerintahan.

Terdapat birokrasi yang Kerajaan Mataram Islam kembangkan mempunyai pola yang mengacu kepada pola birokrasi Kerajaan Majapahit yang terpusat kepada raja selaku dewa-raja. Birokrasi ini sifatnya masih tradisional, yakni birokrasi sebagai pengembangan rumah tangga raja dalam mempersatukan wilayah dengan religio-magis, hubungan tali kekeluargaan, kekuatan militer pusat sebagai stabilisator, dan sistem upeti/pajak.⁵ Struktur birokrasi tersebut ditentukan sesuai dan konsep perwilayahan negara dan pusat keraton serta mengalami perkembangan perluasan ke luar yang terbagi atas 4 bagian wilayah, yakni:⁶

a) Kutagara

Daerah keraton yang menjadi tempat tinggal raja sekaligus keluarga ataupun para pejabat tinggi yang lain yang memiliki tanggungjawab terhadap pemerintahan dalam.

b) Negara Agung

Daerah ini letaknya di sekitar kutagara juga sebagai wilayah inti yang mencakup wilayah Bumi gede atau Siti Ageng, Bagelan, Kedu, Pajang. Pajang letaknya di sebelah barat daya kota Surakarta, Bagelan letaknya di Jawa bagian tengah selatan, yaitu diantara sungai Jali dengan Bagawanta, Kedu letaknya di sebelah utaranya yang menjadi aliran sungai Praga bagian hulu, serta Bumi Gede letaknya di sebelah barat-daya kota Semarang, meliputi wilayah antara Kedungjati dengan Ungaran.

c) Pasisiran

Daerah otonom Kerajaan Mataram Islam yang ada di Pantai Utara Jawa. Daerah ini terbagi atas 2, yakni pasisiran kulon serta pasisiran wetan. Pasisiran wetan Demak ke timur mencakup Kudus, Pati,

⁵ P. J. Suwarno, "*Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu Dan Sekarang* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya", 1989), 18–19.

⁶ Munawar, "Pengelolaan Pajak Di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M," 10–23.

Jejara, Lasem, Rembang, Sedayu, Tuban, Gresik, Lamongan, Pasuruan, Surabaya, Blambangan. Semenetera pasisiran kulon Demak ke barat, yang mencakup Kendal, Semarang, Pemalang, Pekalongan, Brebes, Tegal, Indramayu, Cirebon, Karawang.

d) Mancanegara

Terletak di luar negara agung, yang mencakup wilayah Jawa bagian timur maupun tengah, tidak termasuk wilayah pantai serta terbagi atas 2 bagian, yakni mancanegara *kulon* dan mancanegara *wetan*. Daerah mancanegara *wetan* dari Ponorogo ke timur, yang mencakup Madiun, Magetan, Jogorogo, Grobogan Kaduwung, Pacitan, Ponorogo, Jipang, Kediri, Blitar, Wirasaba, Lodaya, Srengat, Nganjuk, Berbek, Pace, Wirasari, Cakuwu. Sementara mancanegara *kulon* diawali dengan Purwokerto ke barat, yang mencakup Sumedang, Banyumas, Bandung. Daerah itu sebagai wilayah otonom Kerajaan Mataram Islam yang ada di luar negara agung.

Untuk melaksanakan pemerintahan, Sultan Agung menempatkan maupun mengangkat pejabat mulai dari tingkat pusat hingga wilayah sesuai dengan wilayah yang telah dibagi di atas. Peraturan itu dipergunakan dalam membentuk aktivitas pemerintahan yang terkontrol. Sehingga, raja akan mudah melihat perkembangan pada setiap daerah kekuasaan.

Seorang *patih* (wakil raja) membantu raja yang menjadi pusat dari birokrasi Kerajaan Mataram Islam.⁷ Untuk mengatur pemerintahan dalam pusat keraton diberikan pada *wedana*. Para *wedana* ini dipimpin *patih lebet*, serta semua *wedana* dibantu seorang *kebayan* (asisten bupati di bawah kliwon), seorang *kliwon* (lurah desa/asisten bupati di bawah *wedana*), serta empat puluh

⁷ Purwadi, "Kamus Jawa-Indonesia; Indonesia Jawa (Yogyakarta: Bina Media, 2005), 355."

mantri jajar.⁸ Untuk mengatur pemerintahan pada negara agung, raja memberikannya pada *wedana-jawi* yang dipimpin seorang *patih-jawi*. Setiap *wedana* pun dibantu seorang *kebyan*, *kliwon*, serta empat puluh mantri jajar. Setiap *wedana* tersebut berada pada kutagara, sementara wilayahnya di negara agung diberikan pada demang ataupun kyai lurah.⁹

Guna melakukan kontrol atas daerah di luar pusat pemerintahan. Sultan Agung memposisikan Bupati di daerah pasisiran ataupun mancanegara. Para Bupati di daerah mancanegara mempunyai pangkat Raden Arya ataupun Tumenggung, sementara dalam daerah pasisiran disebut sebagai Syahbandar yang berpangkat Kyai Demang, Tumenggung, maupun Raden Ngabehi. Bupati pasisiran ataupun mancanegara ada dalam bimbingan maupun pengawasan langsung dari patih.¹⁰ Sultan Agung di samping memposisikan Bupati di daerah pasisiran maupun mancanegara memposisikan pula Bupati penting di daerah pusat. Bupati ini menjadi staff ahli yang kapan saja dibutuhkan perhitungannya oleh raja, di samping itu pun guna melihat gerak-geriknya. Sebagai pengawasan perilaku para pembesar Kerajaan Mataram Islam sendiri ataupun para Bupati di wilayah, sehingga Sultan Agung mengangkat “dinas rahasia” yang dinamakan *abdi kajineman* ataupun *telik sandi*.¹¹

Masih ada kira-kira seratus lima puluh jenis jabatan yang rendah di bawah para pejabat tinggi pusat tersebut. Mereka dikelompokkan ke beberapa jenis jabatan, misalnya keuangan, keprajuritan, kesenian, pengadilan, keagamaan, perlengkapan. Setiap jabatan itu sebagai

⁸ Widada and dkk, "*Kamus Bahasa Jawa (Bausastra Jawa)*" (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 291.

⁹ Suwarno, "*Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu Dan Sekarang*", 24.

¹⁰ Moedjanto, "*Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*", 114–15.

¹¹ A. Sartono Kartodirdjo and dkk, "*Negara Dan Nasionalisme Indonesia; Integrasi, Disintegrasi, Dan Suksesi*" (Jakarta: PT Grasindo, 1997), 48.

wujud birokrasi tradisional yang menjadi kepanjangan rumah tangga raja, berlaku sesuai perintah raja, serta memperoleh imbalan yang menjadi anugerah raja, yang bisa saja diambil lagi kapan pun, dikarenakan setiap pejabat harus mengabdikan kepada raja.¹²

Saat Sultan Agung menjadi raja, dibentuklah pegawai *wedana gedong tengen* maupun *wedana gedong kiwa* yang menangani perbendaharaan atau keuangan kerajaan.¹³ *Wedana* itu mengelola semua pemasukan yang menjadi kas kerajaan, maka bisa dianggap bahwasanya pada pusat Kerajaan Mataram Islam telah ada organisasi ataupun lembaga pada bidang keuangan. Namun, lembaga tersebut belum digunakan menjadi alat utama perekonomian kerajaan, dikarenakan untuk raja kekayaan hanya untuk ditimbun maka tidak pernah dikatakan menjadi alat efisiensi pada lembaga perekonomian kerajaan. Dengan adanya lembaga itu, Sultan Agung sudah mengusahakan supaya pemasukan kas kerajaan bisa dikendalikan secara baik.

Di bawah *wedana gedong tengen* beserta *wedana gedong kiwa*, ada jabatan keuangan yang dibuat sesuai dengan tugas yang diterima. Antara lain *meladang*, *pemaosan*, serta *ketandan*. Tugas mereka adalah sebagai pengumpul pajak tanah, pemungut hasil bumi yang biasanya berupa padi, palawija dan hasil pertanian lainnya, serta pengurus pajak uangan. sewaktu pemerintahan Sultan Agung, pajak yang dipungut dari rakyat tiap tahunnya senantiasa sampai ke pemerintah pusat.¹⁴

Wedana gedong tengen maupun *wedana gedong kiwa* yang didirikan Sultan Agung fungsinya hanya sebatas menjadi penghimpun aset yang masuk ke kas kerajaan. Untuk mengelola keuangan kerajaan, pegawai itu tidak mencatat secara keseluruhan terkait dengan

¹² Moedjanto, "Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram", 116.

¹³ Moedjanto, 113.

¹⁴ Suratmin dan dkk, "Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982), 21.

pemasukan dan pengeluaran kerajaan. Hal tersebut pun terkait dengan pemenuhan kebutuhan kerajaan yang tidak menentu tiap waktunya.

Pengaturan “sistem pembiayaan” kerajaan tidak menggunakan istilah pengeluaran maupun pendapatan sebagaimana istilah modern, namun mempergunakan istilah pembagian serta pungutan kekayaan oleh kerajaan.¹⁵ Tetapi, bila dipahami lebih mendalam, pungutan sebetulnya ialah istilah cara yang dipergunakan dalam memperoleh kekayaan kerajaan. Adanya pembagian kekayaan pun dapat dimaknai menjadi usaha memanfaatkan kekayaan kerajaan, dengan demikian pada penerapannya pengeluaran juga akan terlihat, walaupun belum terdapat sistem pencatatan yang jelas.

Selama pemerintahan Sultan Agung, masyarakat di Kerajaan Mataram Islam mempunyai pekerjaan yang bervariasi, misalnya pedagang, petani, prajurit, peternak, ataupun lainnya. Selain pribumi, ada juga warga asing yang bermukim di daerah Kerajaan Mataram Islam, yakni orang Cina yang datang dikarenakan kepentingan dagang. Tingkatan sosial yang ada di masyarakat dibedakan ke dalam orang-orang kecil (*wong cilik*) dan orang-orang besar (*wong gede*). *Wong gede* ialah warga lapisan atas yang menjadi kaum yang memerintah, sementara *wong cilik* yaitu warga lapisan bawah yang menjadi kaum yang diberi perintah.¹⁶ Golongan bangsawan bersama dengan raja menjadi pemegang kekuasaan paling tinggi, menduduki strata sosial paling tinggi di Kerajaan Mataram Islam menjadi golongan *wong gede*. Kian dekat ikatan darah seorang dengan raja, sehingga status sosial pun kian tinggi. Sistem seperti itu dinamakan sebagai istilah *ascribet status*, yakni status sosial yang didapat menurut kelahiran ataupun keturunan tanpa membedakan maupun memandang perbedaan kemampuan dan rohaniah.

¹⁵ Soemarsaid Moertono, "*Negara Dan Usaha Bina-Negara: Studi Tentang Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 139.

¹⁶ Kartodirdjo and dkk, "*Negara Dan Nasionalisme Indonesia; Integrasi, Disintegrasi, Dan Suksesi*", 191–92.

Selain itu yang digolongkan sebagai *wong gede* ialah para pejabat tinggi yang masuk ke birokrasi kerajaan. Mereka merupakan aparat birokrasi yang dijadikan alat dalam mengendalikan pemerintahan raja. Mereka yang dipilih raja sebagai pejabat mendapat wewenang dalam mengontrol masyarakat yang diperintahkan.

Mayoritas dari penduduk yang ada yaitu mempunyai profesi menjadi petani. Sebab menurut geografis, letak Kerajaan Mataram Islam di wilayah pedalaman Jawa yang memiliki corak agraris. Berlandaskan laporan Van Goens, lahan persawahan sangat indah dan luas, lebih luas lagi saat melalui pintu Gerbang Selimbi (ataupun setentang Gunung Merbabu, Slembi) yang menjadi pintu masuk kerajaan. Dijelaskan juga bahwasanya ada 3.000 lebih desa padat penduduk. Setiap desa didiami seratus ataupun seratus lima puluh kepala keluarga, dan mencapai seribu hingga seribu limaratus kepala keluarga. Keadaan alam di daerah Kerajaan Mataram Islam pun ditunjang dengan air melimpah yang memberi keuntungan untuk masyarakat.¹⁷ Menurut laporan para dubes VOC, dipaparkan bahwasanya di wilayah pusat Kerajaan Mataram Islam, terutama di daerah Surakarta mempunyai tanah yang amat subur guna ditanami padi. Orang akan sibuk mengetam padi ketika musim panen. Ketika memasuki bulan sesudah panen, orang berbondong-bondong memikul padi serta ada juga yang mengangkat padi dengan mempergunakan gerobak yang ditarik enam hingga delapan ekor lembu.¹⁸

Di samping pertanian, perdagangan pun sebagai sektor krusial yang menjang pemenuhan keperluan sandang pangan masyarakat dalam Kerajaan Mataram Islam. Aktivitas perdagangan banyak dilaksanakan di beberapa desa. Kerta yang menjadi ibukota kerajaan memiliki penduduk yang padat sebagai kota makmur. Di kota itu ada pasar yang menjadi tempat aktivitas

¹⁷ Denys Lombard, "*Nusa Jiwa: Silang Budaya*", III (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 42.

¹⁸ Pranata, "*Sultan Agung Hanyakrakusumo*" (Jakarta: PT Yudha Gama Corp, 1977), 16.

perdagangan baik oleh penduduk dari luar ataupun dalam wilayah kerajaan.¹⁹ Saat de Haan sedang berada pada perjalanan dari Pingit ke arah pusat kerajaan, dapat dilihat beberapa pedati yang bermuatan barang ataupun padi ke arah ke pasar Kerta. Para pedagang luar kota, seperti dari Jawa bagian timur, tengah, ataupun barat datang ke sana, walaupun memerlukan waktu 2 bulan.²⁰

Pelaksanaan perdagangan di Kerajaan Mataram Islam terjadi baik pada skala kecil ataupun besar. Perdagangan dan pertukaran barang atau komoditi pada skala kecil dilakukan di pasar domestik, misalnya ialah dalam bentuk hasil pertanian, gerabah, alat pertanian, perhiasan, ataupun hewan ternak. Perdagangan barang pada skala besar bisa diketahui melalui kegiatan ekspor-impor dari pelabuhan di Jawa bagian utara, khususnya ialah pelabuhan Jepara. Dengan adanya pelabuhan itu, Kerajaan Mataram Islam setiap tahunnya dapat melakukan ekspor beras ke Maluku sebanyak 60 jung (15 ton).²¹ Beras sebanyak 2000 ton pun diekspor ke VOC di Batavia pada tahun 1615. Diakibatkan oleh surplus beras yang terjadi setiap tahun, aktivitas perdagangan yang mulanya kurang diperhatikan, mulai tumbuh maupun berkembang, walaupun pertanian tetap sebagai sumber utama ekonomi kerajaan.²² Bukan hanya itu, lewat beras juga Kerajaan Mataram Islam dapat melakukan impor senjata, rotan, porselin, sutera, keramik, merica dari para pedagang asing dengan pelabuhan pesisir Jawa bagian utara.²³

¹⁹ Inajati Adrisijanti, "*Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*" (Yogyakarta: Jendela, 2000), 237.

²⁰ Ki Abdacarakatama, "*Ensiklopedia Raja-Raja Tanah Jawa; Silsilah Lengkap Raja-Raja Tanah Jawa Dari Prabu Brawijaya V Sampai Sri Sultan Hamengkubuwono X*". (Yogyakarta: Narasi, 2010), 88–89.

²¹ G Moedjanto, "*Sultan Agung, Keagungan Dan Kebijaksanaannya*" (Yogyakarta: YPIK Panunggalan Lembaga Javanologi, 1986), 9.

²² Anthony Reid, "*Dari Ekspansi Hingga Krisis II: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680*" (Yayasan Obor, 1992), 28.

²³ Soemarsaid Moertono, "*Negara Dan Usaha Bina-Negara: Studi Tentang Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*", 233.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, Kerajaan Mataram Islam sebagai kerajaan pedalaman yang bergantung pada pertanian yang menjadi sumber ekonomi utamanya. Mengenai itu, maka permasalahan agraria menjadi sumber kehidupan yang sangat penting untuk kerajaan, khususnya terkait dengan pemilikan dan penguasaan tanah. Namun, walaupun menjadi daerah pedalaman yang subur dengan pertanian, aktivitas perdagangan tetaplah menjadi bidang terpenting untuk kelangsungan ekonomi masyarakat ataupun kerajaan.

Kerajaan Mataram Islam tidak menggunakan istilah pendapatan kerajaan sebagaimana yang dikenal dalam istilah modern, tetapi menggunakan istilah pungutan. Namun jika dipahami istilah pungutan digunakan karena cara yang digunakan untuk mendapatkan sumber kas kerajaan. Adapun sumber kas kerajaan terdiri dari:

a) Pajak

Dalam hal pengelolaan perekonomian di setiap wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung memberi kepercayaan secara penuh untuk para pejabat baik tingkat pusat sampai daerah. Mereka mendapat tanggung jawab maupun kekuasaan dalam mengatur setiap wilayah yang dipimpin, baik negara kutanegara, negara agung, pasisiran, ataupun mancanegara, khususnya terkait dengan kepengurusan pajak yang menjadi sumber pendapatan kerajaan. Di kutagara yang menjadi wilayah inti kerajaan, pajak dikelola di bawah pengawasan raja serta masuk ke perbendaharaan kerajaan secara langsung. Dalam wilayah negara agung, pajak yang berasal dari rakyat diambil para kepala desa (*bekel* atau *petinggi*) lalu kemudian diberikan pada atasan, yakni ke demang lalu ke bupati lalu ke wedana sampai ke patih yang selanjutnya memegang tanggung jawab langsung pada raja. Di daerah pasisiran maupun mancanegara, pajak dikelola para wedana-bupati. Gelar untuk wedana-bupati mancanegara ialah Raden Arya ataupun Tumenggung. Sementara gelar untuk wedana-bupati pasisiran yaitu Syahbandar.

Di samping menunjuk para pejabat pengelola pajak, Sultan Agung pun menentukan jenis beserta jumlah pajak yang perlu diberikan pada Kerajaan Mataram Islam. Yakni:

1) Pajak penduduk (pajak kepala).

Pajak ini dibebankan pada penduduk dari luar ataupun penduduk asli Kerajaan Mataram Islam, baik penduduk asing yang tujuannya berdagang ataupun yang lain ataupun penduduk asli Jawa yang tempat tinggalnya di kerajaan.²⁴ Besaran pajak penduduk yang harus dibayarkan yakni orang Cina yang tidak menikah 18 real, orang Cina yang menikah 22,5 real, budak baru 0,25 real, dan orang Jawa 4,5 real. Pajak ini diberikan oleh para penguasa daerah ketika upacara *Garebeg Mulud* guna memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW yaitu tiap tanggal 12 bulan *Mulud* di kelender Jawa. Dalam kesempatan tersebut, penguasa wilayah wajib menghadiri agar membuktikan ketaatannya pada raja serta memberikan pajak yang dikumpulkan dalam setahun.²⁵

2) Pajak tanah

Sebagai raja yang menguasai seluruh wilayah, Sultan Agung melakukan kebijakan ekonomi dan politik untuk mengelola tanah yang ada agar terkelola dengan baik. Kebijakan ini diawali dengan menunjuk para pejabat/wakilnya di wilayah negara agung, kutagara, pasisiran ataupun mancanegara untuk membantu mengurus tanah kekuasaan di wilayah masing-masing. Di Kutagara, ditunjuk *patih lebet* yang membawahi *wedana lebet*, dan setiap *wedana* dibantu 1 kliwon, 1 kebayan, serta 40 mantri jajar. Di negara agung ditunjuk *patih jawi* yang membawahi *wedana jawi*, dan setiap *wedana* dibantu oleh seorang bupati dan demang atau kyai lurah. Di

²⁴ Soemarsaid Moertono, 154–55.

²⁵ Adrisijanti, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*, 2000, 236–37.

Mancanegara ditunjuk para bupati dengan gelar Tumenggung atau Raden Arya dan di Pasisiran juga ditunjuk para bupati atau dikenal Syahbandar dengan gelar Tumenggung, Kyai Demang atau Raden Ngabehi. Dengan begitu raja sebagai pusat aktivitas dapat mengetahui perkembangan yang ada di berbagai wilayah kekuasaannya. Kemudian Sultan Agung melakukan pembagian tanah sesuai lingkaran konsentris wilayah Kerajaan Mataram Islam. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan guna mengontrol masyarakat yang ada dalam naungan pemerintahannya. Diantaranya tanah menjadi beberapa jenis, yaitu:²⁶

Pertama, tanah narawita. Tanah ini berada di kutagara dan negara agung yang merupakan wilayah pusat dan inti kerajaan. Dalam mengelola tanah narawita raja menunjuk patuh untuk kemudian diserahkan kepada para petani untuk menggarapnya. Tanah-tanah tersebut dikelola menjadi lahan pertanian dengan padi sebagai tanaman utama. Selain pertanian, tanah narawita juga dikelola menjadi lahan perkebunan untuk menghasilkan rumput, bunga, minyak dan lain sebagainya. Hasil yang didapat dari tanah narawita diperuntukkan terutama bagi kebutuhan kerajaan.²⁷

Kedua, tanah perdikan. Tanah ini berada di daerah pedesaan terutama di wilayah Negara Agung yang diserahkan kepada ulamadan penghulu sebagai tokoh agama. Tanah perdikan dimanfaatkan untuk dijadikan makam, tempat

²⁶ Zaid Munawar, "Tanah, Otoritas Politik, Dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam (1613-1645 M)," *Diakronika* 21, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol21-iss1/163>.

²⁷ Suharjo Hatmosuprobo, "*Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram*" (Yogyakarta: Pembinaan Pengajaran Sejarah IKIP Sanata Dharma, 1980).

ibadah, ataupun semacamnya yang tidak dikenakan pungutan pajak.²⁸

Ketiga, tanah lungguh atau disebut juga dengan apanage. Tanah ini lebih luas dibandingkan dengan tanah narawita dan tanah perdikan sebab tersebar di daerah mancanegara, negara agung, ataupun pasisiran yang diserahkan ke para pejabat tinggi ataupun bangsawan sebagai gaji atas kontribusi yang diberikan kepada kerajaan. Pengelolaan tanah lungguh dipercayakan kepada para bupati di wilayahnya masing-masing.²⁹ Contoh tanah lungguh di Negara Agung, misalnya, Kedu, Bumi Gede dan Pajang. Setiap daerah tersebut terbagi atas dua bagian: Kedu meliputi daerah Bumija dan Siti Bumi di sebelah timur dan barat Sungai Progo; ataupun wilayah Numbak Anyar yang letaknya antara Sungai Progo dengan Sungai Bogowonto; Bumi Gede terletak di antara Demak dan Pajang yang mencakup wilayah Sewu, letaknya antara Sungai Donan dengan Sungai Bogowonto di Cilacap, Pajang mencakup wilayah Panumpang yang meliputi daerah Panekar dan Sukowati.³⁰

Selanjutnya Sultan Agung menentukan luas tanah lungguh yang didapat oleh para bangsawan dan pejabat kerajaan berdasarkan derajat jabatan dan kebangsawanan pada struktur birokrasi kerajaan. Untuk bangsawan setingkat Ibu (Ratu Ibu) dan istri raja (Ratu Kencana) mendapat 1000 cacah (1 cacah/karya = 4 bahu) dan Adipati Anom 8000 cacah. Untuk pejabat setingkat patih mendapat 20.000 cacah. Untuk pejabat setingkat *wedana lebet* mendapat 5000 cacah, sedang *wedana jawi* luas tanah yang didapat tidaklah

²⁸ Soemarsaid Moertono, "*Negara Dan Usaha Bina-Negara: Studi Tentang Mataram II, Abad XVI Sampai XIX.*"

²⁹ Hatmosuprobo, "*Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram.*"

³⁰ M. J. Puspongoro and N. Notosusanto, "*Sejarah Nasional Indonesia*" (Balai Pustaka, 1984).

sama, tergantung dari luas tanah yang diperintahnya. Misalnya, *wedana bumi* dan *wedana bumija*, masing-masing mendapat 6000 cacah, sedangkan *wedana siti ageng tengen* dan *wedana siti ageng kiwa*, masing-masing 10.000 cacah. Hak memegang tanah oleh para pejabat tersebut sewaktu-waktu dapat dikurangi dan bahkan dicabut kembali oleh raja sebagai pemilik tanah karena suatu hal, misalnya pejabat yang bersangkutan melakukan kesalahan, tidak setia atau tidak patuh terhadap perintah raja.³¹

Terakhir, Sultan Agung memprioritaskan pengelolaan tanah untuk sektor pertanian karena kondisinya yang subur dengan air yang melimpah. Pendistribusian tanah, terutama tanah lungguh, tidak lain adalah agar dapat dikelola secara maksimal untuk pertanian. Sebab pada masanya pertanian menjadi sumber utama bagi perekonomian kerajaan. Tanah pertanian ini dikelola melalui para patuh (bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan) yang telah ditunjuk oleh Sultan Agung.³² Para patuh kemudian menugaskan para pejabat di bawahnya, mulai dari bupati, demang/lurah, hingga sampai kepada bekel. Melalui para *bekel*, tanah kemudian diserahkan kepada para petani untuk digarap. Jika tanah palungguh masih berupa hutan belukar, maka pemegang lungguh memerintahkan para petani untuk mengolah dan menjadikannya tanah usaha, terutama untuk pertanian.³³

Upaya Sultan Agung untuk meningkatkan pertanian dilakukan dengan berbagai cara. *Pertama*, membuat danau atau lautan buatan di Plered sebagai bendungan untuk menampung air

³¹ Moedjanto, "*Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*".

³² Suratmin and dkk, "*Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Daerah Istimewa Yogyakarta*".

³³ Hatmosuprobo, "*Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram*".

dengan memanfaatkan Sungai Opak yang mengalir di dekat kota. Van Goens melaporkan, air tersebut dialirkan ke lahan-lahan persawahan, tempat-tempat pemandian dan rumah-rumah penduduk melalui saluran air yang terbuat dari batu dan melalui sungai-sungai kecil lainnya.³⁴

Kedua, mengolah tanah pertanian untuk ditanami padi sebagai komoditi utama negeri Mataram Islam. Pekerjaan ini dilakukan pada saat musim hujan ketika penduduk sedang tidak melakukan peperangan, yaitu antara Desember hingga Februari. Setelah memasuki bulan Maret hingga Mei, petani melakukan panen padi dan memasukkannya ke dalam lumbung-lumbung. Usai masa panen selesai, dimulailah ekspansi wilayah dan ekspedisi terhadap bupati-bupati yang berontak.³⁵ Sebab pada masanya, hubungan antara pusat dan daerah, terutama Jawa bagian tengah, sering kali mengalami pasang surut dan berakibat terhadap banyaknya wilayah taklukan yang bertindak secara merdeka sehingga penguasa pusat tiap kali pula harus memperjuangkan lagi supaya bisa meletakkan hegemoninya.³⁶

Ketiga, untuk meningkatkan produksi beras, maka Sultan Agung melakukan upaya intensifikasi tanaman padi. Adapun langkah yang dilakukan yaitu memperkuat kerja sama antar kelompok tani dan antara petani, baik dalam penggunaan air irigasi, tertib pola tanam, pengendalian penyakit dan hama, penggunaan peralatan ataupun dalam panen. Upaya intensifikasi ini seringkali dibarengi dengan

³⁴ Inajati Adrisijanti, "*Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*" (Jendela, 2000).

³⁵ Sabdacarakatama, '*Ensiklopedia Raja-Raja Tanah Jawa; Silsilah Lengkap Raja-Raja Tanah Jawa Dari Prabu Brawijaya V Sampai Sri Sultan Hamengkubuwono X*'.

³⁶ S. Kartodirdjo, "*Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium*" (Grramedia Pustaka Utama, 1987).

kebijakan pemindahan penduduk, baik keluar maupun masuk wilayah Mataram. Fenomena perpindahan penduduk (migrasi) erat kaitannya dengan faktor tidak meratanya distribusi dan penyebaran penduduk dan juga tidak luput dari adanya faktor paling yang paling dominan yaitu faktor ekonomi. Perpindahan penduduk dalam konteks Kerajaan Mataram Islam disebabkan oleh faktor dorongan politik dan ekonomi, yaitu adanya perintah dari seorang raja kepada rakyatnya untuk mengelola tanah-tanah kekuasaan menjadi tanah pertanian guna mendukung program intensifikasi tanaman padi. Sebagai contoh, ketika Sultan Agung telah berhasil menaklukkan berbagai wilayah di Jawa bagian timur, ia memindahkan penduduk taklukkan ke pusat Kerajaan Mataram Islam untuk meningkatkan tenaga kerja dalam penanaman padi.³⁷

Pemindahan penduduk bertujuan untuk mendukung program intensifikasi tanaman padi juga dilakukan Sultan Agung ke wilayah Mancanegara dan Pasisiran. Pada tahun 1632, Kerajaan Mataram Islam berhasil menaklukkan kekuatan-kekuatan wilayah Jawa bagian barat, seperti Sunda, Cirebon, Karawang, dan yang lainnya. Sultan Agung mengirim para petani ke Cirebon, Dermayu, dan sebenarnya juga semua dataran pantai di sebelah barat untuk kembali menghuni dan menyuburkan tanah-tanah pertanian.³⁸ Di tahun-tahun sebelumnya, untuk mendukung penyerangan Kerajaan Mataram Islam ke Batavia yang diduduki VOC, Sultan Agung melakukan pengetatan program intensifikasi tanaman padi di daerah Pantai Utara

³⁷ H. J. de Graaf, "*Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*" (Jakarta: PT Pustaka Grafiti Pers, 1986).

³⁸ Sabdacarakatama, "*Ensiklopedia Raja-Raja Tanah Jawa; Silsilah Lengkap Raja-Raja Tanah Jawa Dari Prabu Brawijaya V Sampai Sri Sultan Hamengkubuwono X*".

Jawa dengan tujuan di samping untuk kebutuhan pangan tentara yang jumlahnya sangat besar juga agar dapat mencukupi keperluan pangan masyarakat setempat.

Selama masa Sultan Agung, lokasi intensifikasi tanaman padi berpindah-pindah ke tempat lain. Hal tersebut dilakukan karena menyesuaikan dengan rencana pengerahan pasukan dalam rangka ekspansi wilayah. Dalam mendukung program intensifikasi, Sultan Agung menerapkan sistem pertanian terpadu, yaitu antara ternak dan tanaman. Sistem pertanian terpadu ternak dan tanaman merupakan sistem pertanian yang cirinya yaitu erat kaitannya antara komponen ternak dan tanaman di sebuah aktivitas usaha tani. Sistem pertanian ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani. Dalam konteks ini, Sultan Agung telah menerapkan sistem pertanian terpadu yang didukung dengan penerapan pola integrasi antara padi dan ternak, yaitu kerbau dalam mengelola persawahan. Tenaga kerbau digunakan untuk mengolah atau membajak tanah, sedangkan kotorannya diolah untuk dijadikan pupuk pertanian. Sebaliknya, limbah pertanian seperti *titen* (jerami palawija) dan *damen* (jerami padi) digunakan untuk pakan kerbau. *Damen* dan *titen* oleh masyarakat biasanya disimpan sebagai persediaan pangan kerbau ketika musim kemarau tiba, karena pakan lain seperti rumput sulit didapat.³⁹

Guna memaksimalkan peningkatan bidang pertanian, Sultan Agung membentuk wadah forum komunikasi untuk sarana pembinaan bagi para petani. Berbagai hal yang dibahas di dalamnya menyangkut kebijakan-kebijakan kerajaan terutama persoalan pertanian. Misalnya, bagaimana meningkatkan kerjasama dalam

³⁹ Munawar, "Pengelolaan Pajak Di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M."

pengolahan lahan, ketertiban menanam dan penggunaan modal. Berbagai kebijakan Sultan Agung pada bidang pertanian yang diterapkan melalui peraturan-peraturan yang ketat dan didukung dengan loyalitas para petani telah menghasilkan surplus beras di Kerajaan Mataram Islam.⁴⁰

Pajak tanah kemudian menjadi sektor ekonomi yang menghasilkan pendapatan terbesar untuk kerajaan. Sebab, raja sebagai pemilik tanah, sehingga setiap hasil bumi dari tanah itu perlu dibebani pajak yang diberikan pada kerajaan. Proses pembayaran pajak diberikan dari para petani yang mengerjakan pada para bekel. Sesuai dengan perwilayahan, bagi tanah narawita yang menjadi tanah penghasil bahan panganan kerajaan, pajak diserahkan langsung pada istana. Bagi tanah apanage di daerah negara agung, penyerahan pajak dengan berjenjang diserahkan dari para bekel sampai ke patih yang menjadi pejabat pemegang apanage.⁴¹ Bisa dianggap bahwa negara agung yaitu wilayah sumber pendapatan para pembesar kerajaan dan kaum bangsawan. Sementara pendapatan raja untuk perbendaharaan kerajaan, bukan hanya dari tanah narawita, namun diperoleh dari wilayah mancanegara, negara agung, serta pasisiran yang dikuasai Bupati.⁴²

Penduduk menyerahkan pajak hasil bumi dalam bentuk padi pada pemegang lungguh sesuai dengan hasil padi tiap tahunnya. Kriterianya ialah bila dibayar menggunakan pajak, satu real Spanyol sama dengan satu bahu hasil padi. Ukuran luas tanah yang digunakan dalam menetapkan besarnya pajak ataupun jumlah hasil

⁴⁰ Moedjanto, *Sultan Agung, "Keagungan Dan Kebijaksanaannya"*.

⁴¹ Sri Margana and Widya Fitrianiingsih, *"Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal Dan Global"* (Yogyakarta: Ombak, 2010), 111.

⁴² Hatmosuprobo, *"Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram"*, 7.

bumi yang perlu diberikan pada pemegang lungguh yaitu jung. Tiap jung mencakup 5 bahu.⁴³ Dengan resmi, satu *jung* meliputi empat *bahu*, dikarenakan yang sebahu dipinjamkan pada *bekel* menjadi imbalan tugas jabatan dan tidak memperoleh beban pajak maupun pemungutan. Maka, yang diberi beban pajak ataupun pemungutan wajib hanyalah empat *bahu*, yakni tanah yang digarap petani. Tanah pertanian yang empat bahu 4 diupayakan dengan hasil *maro*, yakni setengah hasil bagi petani yang menggarap serta setengah lainnya hasil guna pemegang palungguh.⁴⁴

Berlandaskan pembagian tersebut, walaupun bagian yang didapat oleh para pegawai rendahan dan keraton lebih sedikit dibanding hasil yang petani terima, namun dikarenakan membawahi banyak patih dengan tanah lungguhnya, sehingga hasil yang dihimpun melalui pajak itu kemudian bertambah. Pajak tanah yang masuk dari beberapa wilayah kekuasaan menyebabkan perbendaharaan Kerajaan Mataram Islam menjadi kaya.⁴⁵ Bukan hanya pembagian hasil padi, terdapat juga pembagian hasil bumi yang lain, misalnya palawija. Bagi hasil tanaman palawija yaitu *mertelu*, berarti petani $\frac{2}{3}$ dan pemegang palungguh $\frac{1}{3}$.⁴⁶

⁴³ Soemarsaid Moertono, "*Negara Dan Usaha Bina-Negara: Studi Tentang Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*", 144.

⁴⁴ Hatmosuprobo, "*Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram*", 6.

⁴⁵ Suratmin and dkk, "*Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Daerah Istimewa Yogyakarta*", 18.

⁴⁶ Hatmosuprobo, "*Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram*", 6.

Tabel 4.1
Daftar Pembagian Padi dalam Hitungan Jung

Penerima	Bagian
Petani	%
<i>Bekel</i>	%
<i>Demang/ngabehi</i>	,
Bupati	,
Keraton	%

Sumber: Hatmosuprobo, 6.

3) Pajak bea cukai barang dan jasa

Orang Jawa mempunyai istilah tersendiri atas pajak bea cukai jasa maupun barang. Pungutan dan penghasilan melalui sektor layanan dan barang dikenal sebagai *beya*. Dalam masa Sultan Agung, *beya* didapat dari seseorang yang masuk pada aktivitas perdagangan yang terjadi di daerah mancanegara, pusat dari kerajaan, ataupun pasisiran. Para pedagang yang berjalan ke daerah pusat dari Kerajaan Mataram Islam, pajak bea cukai jasa maupun barangnya diambil pada beberapa pintu gerbang yang dibentuk kerajaan. Diantaranya pintu gerbang itu, yakni Ampel, Slembi, Taji, Opak, Kalijajir, serta Gegeledekan.⁴⁷

Berdasarkan masa Sultan Agung, dipilih seorang syahbandar agar menjadi kepala pabeyan yang terdapat dalam semua pelabuhan pesisir utara. Mereka mengelola pemungutan bea cukai tiap barang yang keluar ataupun masuk pelabuhan. Bea ini diambil di suatu tempat di kota pelabuhan yang dinamakan pabeyan. Berlandaskan pada laporan Tome Pires, cukai bagi aktivitas perdagangan di pelabuhan Jawa senilai empat persen. Di samping *beya*, raja juga meminta hadiah ataupun pemberian.⁴⁸

⁴⁷ Munawar, "Pengelolaan Pajak Di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M."

⁴⁸ Soemarsaid Moertono, "*Negara Dan Usaha Bina-Negara: Studi Tentang Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*", 142.

Pelabuhan utama Kerajaan Mataram Islam di Jepara sebagai ada seorang Syahbandar. Jepara tempat kedudukan seorang wedana-bupati yakni yang menjadi ibukota pasisiran wetan. Pada kompleks *dalem* (rumah) dari wedana-bupati setiap aktivitas administrasi wilayah pesisir dilakukan pemusatan. Wedana-bupati wilayah ini memperhatikan beras menjadi bahan ekspor paling penting, terlebih dikarenakan ekspor beras ialah suatu monopoli dari kebijakan Sultan Agung.⁴⁹

Pembayaran pajak yang berasal dari aktivitas perdagangan yang berlangsung di Pesisir Pantai Utara yang berpusat pada pelabuhan utama, Jepara. Sultan Agung tahun 1614 membuat peraturan khusus pada para pedagang Cina ataupun Belanda di Jepara, yakni membebaskan dari kewajiban membayar bea ekspor ataupun impor. Pendapat Meilink-Roelofs, pembebasan dari bea ini tujuannya supaya menarik para pedagang asing agar datang ke Jepara serta memperoleh bantuan Belanda guna menyerang Surabaya dan Banten.⁵⁰

b) Upeti

Upeti sebagai corak khas dari kebudayaan masyarakat zaman kerajaan, pada penerapannya istilah upeti tidak dipergunakan untuk sistem pemerintahan modern, dengan demikian istilah upeti tidak dikenal pada sekarang ini. Istilah upeti digunakan untuk menyebut persembahan yang diberikan rakyat kepada kerajaan ataupun raja dengan tujuan tertentu. Upeti dianggap sebagai simbol suatu kepatuhan rakyat terhadap kerajaan ataupun raja yang biasanya berupa uang, emas, barang dangangan, ataupun hasil panen. Penyerahan upeti biasanya didasari karena faktor si pemberi (rakyat) merasa takut pada penguasa ataupun

⁴⁹ Adrian B. Lopian, "*Pelayaran Dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 Dan 17*" (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), 107.

⁵⁰ Lopian, 122.

terdapat harapan tertentu dari si pemberi pada penguasa seperti ingin memperoleh nama, pangkat atau jabatan tertentu.⁵¹

Umumnya, upeti diberikan ke kerajaan bersama dengan diserahkannya pajak tanah dalam bentuk hasil bumi. Upeti juga sebagai pajak yang memberi pendapatan terbanyak ke istana. Penyerahan upeti diserahkan pada para Bupati dalam semua daerah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam, baik di pusat daerah, mancanegara, pesisir ataupun daerah vassal yang berada di luar pulau Jawa.⁵²

Melalui Bupati pasisiran, upeti dalam bentuk uang ataupun barang dipungut dari pedagang di laut utara. Bupati mengambil barang maupun uang dari para pedagang. Sesudah meninggalkan bagiannya, Bupati lalu memberikannya pada pejabat pengawas. Sesudah menyisihkan bagiannya, para pejabat pengawas memberikannya kepada raja.⁵³ Sama halnya bagi para Bupati mancanegara, mereka juga menarik upeti melalui pejabat bawahan, yang mengambil upeti dari rakyat. Selanjutnya dengan koordinasi wedana-bupati, mereka menyerahkan sisa bagian kepada raja. Di samping itu, Sultan Agung pun memerintahkan pada wedana-bupati guna melakukan pengawasan terhadap daerah upeti yang berada di luar pulau Jawa, seperti halnya Bupati Demak bagi wilayah Palembang, Bupati Semarang bagi wilayah Sukadana di Kalimantan, dan Jepara mengawasi daerah upeti Jambi.⁵⁴

Penyerahan upeti ke istana sebanyak 2 kali setahun pada waktu *Mulud* dan *Garebeg Pasa*. Bukan hany menjadi perbendaharaan kerajaan, waktu tersebut

⁵¹ Yusuf Adam Hilman, "*Upeti Dalam Perspektif Teori Hegemoni*" (Ponorogo: Calina Media, 2017), 25.

⁵² Munawar, "Pengelolaan Pajak Di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M."

⁵³ Suwarno, "*Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu Dan Sekarang*", 26.

⁵⁴ Lapien, "*Pelayaran Dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 Dan 17*", 107.

pun dipergunakan dalam mempergelarkan kebesaran juga kekuasaan raja serta mengintegrasikan pemerintahan daerah dengan pusat.⁵⁵ Umumnya, penyerahan pun diikuti dengan kewajiban menghadap raja yang menjadi kontrol politik agar melihat kesetiaan para Bupati pada raja. Jika tidak menghadap raja, sehingga Bupati tersebut dipastikan akan melakukan pemberontakan maka haruslah segera ditegaskan agar tidak melepas diri.⁵⁶ Di sini kontrol perekonomian diadakan bersama dengan kontrol politik, dikarenakan terdapat pengakuan taat pada Kerajaan Mataram Islam artinya upeti akan masuk ke kerajaan, dengan demikian bisa meningkatkan menambah kesejahteraan di dalamnya.⁵⁷

c) *Pasumbang*

Bukan hanya ketetapan tersebut, petani sering diberi di hasil bumi ataupun barang lainnya yang diminta di suatu waktu. Penyerahan ini dikenal sebagai raja *pundhut* atau *pasumbang* (sumbangan). *Pasumbang* diberikan saat patuh ataupun raja mempunyai acara seperti khitanan, perkawiman, hingga acara kematian.⁵⁸

Keharusan memberikan pasumbang yaitu dikarenakan terdapat suatu hubungan yakni ikatanp antaraetani dan raja tercipta pada hubungan *kawula-gusti*, ialah ikatan diantara hamba dan tuan yang saling menjaga setiap kepentingan. Hal demikian dikarenakan terdapat ikatan feodal yang menjadi dasar terhadap pemilikan tanah. Hubungan muncul sesuah penyerahan tanah pada petani dari patih maupun petani menggarap tanah itu berkewajiban memberikan sebagian tenaga

⁵⁵ Suwarno, "*Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu Dan Sekarang*", 26.

⁵⁶ Hatmosuprobo, "*Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram*", 22.

⁵⁷ Ari Spto, "Pelestarian Kekuasaan Pada Masa Mataram Islam : Sebha Jaminan Loyalitas Daerah Terhadap Pusat1," *Sejarah Dan Budaya* 9, no. 2 (2010): 159.

⁵⁸ Munawar, "Pengelolaan Pajak Di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M."

kerja dan hasil tanah. Selain itu, raja pun mempunyai wewenang yang tidak bisa dikurangi ataupun diubah oleh siapapun. Wewenang duniawi dilandaskan atas hubungan feodal, sementara wewenang surgawi mengacu pada kultus dewa raja, berarti pemujaan terhadap raja yang menjadi titisan dari dewa di dunia, petani haruslah setia dengan raja dikarenakan raja sama dengan dewa di dunia. Kesejahteraan batin petani pun amat bergantung pada rajanya yang melindungi petani baik batiniah ataupun lahiriah.⁵⁹

Selain penggunaan istilah pungutan untuk menyebut pendapatan kerajaan, Kerajaan Mataram Islam menggunakan istilah pembagian kekayaan kerajaan untuk menyebut pengeluaran kerajaan. Pembagian aset tersebut dapat dimengerti sebagai usaha memanfaatkan kekayaan kerajaan sehingga pada realitanya alokasi kas kerajaan terlihat. Jenis pengeluaran kas kerajaan Mataram Islam bisa diketahui dari:

a) Gaji Pekerja Keraton

Pengeluaran kerajaan diketahui digunakan dalam pembayaran upah pada masyarakat lingkungan keraton yang tidak memperoleh sebidang tanah untuk pekerjaan. Yakni para tukang sapu ataupun pekerja kebersihan, pemikul air, pengawal, pujangga, perajin, serta para pejabat rendahan yang lain dengan jumlah hampir ratusan. Mereka mendapat upah langsung dari raja berupa *cadhong* (ransum ataupun jatah) berbentuk beras maupun bahan kebutuhan sehari-hari yang lain serta pemberian (*paringan*) pakaian pada waktu tertentu.⁶⁰

b) Pembangunan

Walaupun pengelolaan keuangan kerajaan belum dilakukan secara baik, tentu saja Sultan Agung mengeluarkan harta-benda kerajaan untuk membentuk stabilitas dan pembangunan pada pemerintahannya. Sehingga, pertanian sebagai sumber pendapatan utama

⁵⁹ Hatmosuprobo, "Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram", 19.

⁶⁰ Soemarsaid Moertono, *Negara Dan Usaha Bina-Negara: Studi Tentang Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*, 140.

untuk masyarakat dan kerajaan, sehingga Sultan Agung memberi modal usaha guna melakukan pembangunan desa serta memaksimalkan program intensifikasi padi untuk meningkatkan produksi beras.

c) Peperangan

Kekayaan yang dimiliki kerajaan banyak dipergunakan dalam upaya berperang. Usaha Sultan Agung menjaga daerah kekuasaan yang sangatlah luas ataupun ekspansi yang dilakukan membutuhkan biaya yang banyak. Pada tahun 1626, menurut laporan van Goens, Sultan Agung melakukan pertemuan dengan para pembesar bersama dengan pasukan bersenjata yang berjumlah 900.000 orang lebih. Raja memberi perintah agar membagikan harta kerajaan pada masyarakat senilai 10 hingga 12.000 real. Selanjutnya, Sultan Agung juga berharap masyarakatnya memanfaatkan semua kekayaan maupun kekuatan mereka guna membebaskan Batavia dari tangan VOC.⁶¹

Kekayaan kerajaan dalam bentuk beras dari hasil pertanian dipergunakan dalam biaya peperangan. Bukan hanya dipergunakan sebagai logistik bahan pangan pada saat peperangan, beras pun dimanfaatkan guna membeli senjata agar memaksimalkan kekuatan militer. Hal demikian jelas dilihat dalam penaklukan pertama antara tahun 1613 hingga 1619 ke daerah Jawa bagian timur, peperangan melawan Surabaya sejak 1620 hingga 1625, dengan demikian usaha menaklukkan yang paling besar melawan VOC di Batavia pada tahun 1628 serta 1629, juga penaklukan yang lain. Misal, saat mengalahkan Surabaya, logistik diangkut menggunakan pelayaran, baik melalui jalur laut ataupun sungai. 80 kapal melewati Jepara yang melakukan pelayaran ke timur melalui Gresik membawa pasokan bahan makanan kepada pasukan infanteri.

⁶¹ Dr. H.J. De Graaf, "*Puncak Kekuasaan Mataram (Politik Ekspansi Sultan Agung)*", 1st ed. (Jakarta: Grafiti Pers, 1986), 138.

Selanjutnya, pasokan makanan saat melawan VOC di Batavia datang dari Tegal pada tanggal 13 April 1628, yang diketuai Kiai Ranga memiliki empat belas kaban yang memuat beras. Lalu, tanggal 22 Agustus 1628, persediaan makanan tiba dengan atas nama Tumenggung Bahureksa yang merupakan panglima dengan pangkat paling tinggi armada Jawa di pelabuhan Batavia. Pasokan makanan itu mencakup lebih dari lima puluh kapal. Kapal itu berisi 120 last beras (1 last = 30 liter), 150 ternak, 26.000 kelapa, 10.600 ikat padi, 5.900 ikat gula. Tiga hari selanjutnya 27 kapal datang bermuatan ternak yang harapannya datang lagi. Pasokan bahan makanan yang besar menyebabkan kecemasan pihak Belanda. Sebab, melalui pasokan bahan makanan yang banyak akan mendukung tentara Kerajaan Mataram Islam untuk menyerangnya. Kemudian, tanggal 26 Agustus 1628 yang diketuai Bahureksa datang dengan membawa pasokan makanan melalui Kendal. Tetapi, penaklukan yang dilaksanakan baik tahun 1628 ataupun 1629 tetap tidak dapat menjatuhkan VOC di Batavia yang mempunyai strategi lebih matang serta persenjataan lebih baik dibanding Kerajaan Mataram Islam.⁶²

d) Kebutuhan Keraton

Bukan hanya itu, kekayaan kerajaan pun dipergunakan dalam membeli barang keperluan istana. Kerajaan membeli beberapa barang misalnya katun, kain sutra, porselin, rotan, barang keperluan istana lain mempergunakan beras.

2. Pasar Kerajaan Mataram Islam

Pasar Kotagede yang menjadi pasar Mataram Islam menurut beberapa sumber sejarah diketahui telah ada sejak zaman Ki Gede Pemanahan. Pasar yang dikenal dengan sebutan *Pasar Gede* atau *Sarged* tersebut dibangun terlebih dahulu pada saat Ki Gede Pemanahan akan membuka sebuah kota di atas hutan Mentaok. Keputusan untuk membuka pasar terlebih dahulu dinilai banyak orang sebagai keputusan yang tepat, karena pasar merupakan

⁶² Graaf, 151–52.

jantung perekonomian. Keberadaan pasar menggeliatkan perdagangan, sehingga kota dapat tumbuh dan berkembang pesat, ramai dan makmur.⁶³

Pasar ini terletak di Kotagede karena itulah disebut dengan Pasar Kotagede. Kotagede sendiri menjadi ibukota Kerajaan Mataram Islam. Kotagede didirikan oleh Ki Gede Pemanahan setelah beliau dihadiahi daerah ini oleh Sultan Pajang setelah berhasil menumpas kerusuhan yang terjadi di Pajang. Ki Gede Pemanahan kemudian menjadi penguasa daerah tersebut dan kemudian dikenal dengan nama Ki Gede Mataram atau Ki Ageng Mataram. Beliau memiliki putra yang bernama Sutawijaya, yang diangkat anak oleh Sultan Pajang. Sutawijaya dikenal dengan nama *Ngabehi Loring Pasar*. Nama tersebut kemungkinan besar menunjukkan bahwa tempat tinggal Sutawijaya berada di sebelah utara (*lor*) pasar.

Pasar Kotagede merupakan bagian dari konsep *Catur Gatra Tunggal* yang diartikan sebagai empat tempat yang menjadi kesatuan tunggal. Keempat tempat tersebut terdiri dari pasar sebagai pusat perekonomian, alun-alun sebagai pusat budaya masyarakat, masjid sebagai pusat peribadatan dan keraton sebagai pusat kekuasaan. Walaupun tempat-tempat itu terpisah oleh koridor jalan namun merupakan satu kesatuan.

Transaksi atau aktivitas jual beli pada waktu itu dilakukan di bawah pohon-pohon besar dan rindang, para penjual duduk di atas tanah serta barang dagangannya sebagian besar merupakan hasil bumi yang berupa beras, sayur mayur dan buah-buahan. Barang dagangan tersebut dibawa ke pasar dengan cara dipikul atau digendong dari daerah tempat ditanamnya hasil bumi tersebut.⁶⁴

B. Relevansi Akuntansi pada Masa Kerajaan Mataram Islam dengan Akuntansi dalam Islam

Islam mengajarkan pengikutnya untuk menggunakan aset mereka untuk kebaikan dan bertanggung jawab. Lebih

⁶³ Djoko Soekiman, *Kotagede* (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Jakarta, 1992), 4.

⁶⁴ Theresiana Ani Larasati, "Pasar Kotagede," n.d., 1–5.

lanjut Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sesungguhnya dari seluruh aset yang ada di dunia yang diamanatkan kepada manusia sebagai pengguna (*agent of trust*). Jika ditelaah kita akan menemukan bahwa raja sebagai pemimpin mengelola aset dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mampu mencegah penggunaan aset untuk kepentingan individu saja (baik oleh pejabat kerajaan maupun raja sendiri) sehingga dapat menyebabkan melemahnya perekonomian.⁶⁵ Akuntansi mengutamakan transparansi dan kebenaran di semua proses mulai dari pengumpulan aset hingga kegiatan pelaporan. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi elemen penting untuk memastikan pengguna dapat mengambil manfaat dari laporan untuk membuat keputusan.⁶⁶

Konsep semacam itu telah dikenal pada masa Kerajaan Mataram Islam dalam falsafah hidup *Memayu Hayuning Bawana* (MHB). MHB ialah suatu konsep yang menggambarkan spritualitas Jawa. Konsep MHB pada hubungannya dengan pertanggungjawaban penguasa (mengenai ini artinya raja dan para pejabatnya), berarti melindungi kesejahteraan (keselamatan) dunia baik lahir ataupun batin, maka tanggung jawab auditor yang berpadu dengan nilai MHB akan melahirkan beberapa konsep yang humanis dan didampingi dengan keinginan ataupun pemikiran luhur. Hal tersebut dipergunakan dalam memberi sumbangsih untuk umat manusia beserta alam maupun seisinya.⁶⁷

Pemberian makna terhadap konsep MHB tidak bisa terlepas dari konsep mengenai hakikat hidup manusia di dunia. Manusia berupaya membuat indah dunia dengan kesjejahteraan, kebahagiaan, dan juga keselamatan hidup. Artinya dunia yang

⁶⁵ Nawira Amalia Assagaf, Eko Ganis Sukoharsono, and Zaki Baridwan, "Accounting Practices in the Golden Era of Sultan Babullah: The Sultanate of Ternate (1570-1583)," *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.16761>.

⁶⁶ Mulya et al., "Exploring the Accounting Treatment Ancestor in Sultan Syarif Kasim II Era."

⁶⁷ S. Endaswara, "*Memayu Hayuning Bawana: Laku Hidup Menuju Keselamatan Dan Kebahagiaan Hidup Orang Jawa*" (Jakarta: Narasi, 2013), 25.

telah indah ini tidak dirusak dengan tindakan yang negatif. Hal yang bisa dijalankan seseorang dalam memperindah dunia ialah dengan mengupayakan keselarasan dalam berhubungan dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Agar memperoleh konsep tanggung jawab penguasa sesuai pandangan MHB, maka dibutuhkan penafsiran tentang tanggung jawab penguasa yang sifatnya *Memayu Hayuning Bawana*.⁶⁸

Istilah *Memayu Hayuning Bawana* menjadi konsep hidup yang sakral di dunia spiritual Jawa. Dianggap sakral sebab pada konsep itu mengandung kekuatan mistis. Seperti halnya di kalangan spiritualis Jawa menguraikan konsep itu menjadi pijaran pemikiran bahwasanya selaku manusia kian ingat bahwa terdapat hidup di balik kehidupan.⁶⁹ MHB dicerminkan sebagai bentangan jagad *cilek* (mikrokosmos) dan *jagad gede* (makrokomos), artinya dua jagad ini perlu serta wajib dijaga keselamatannya, lebih jelas lagi sebagai usaha mempertahankan kesejahteraan dunia secara batin ataupun lahir. Keselamatan berawal dari kata *slamet* (*selamet*), sebagai cita-cita luhur orang Jawa agar mengetahui akan kosmiknya. Kosmik dibagi atas 2, yaitu kecil dan besar, ada yang kasar (raga) dan halus (batin), yang mana raga dan batin harus dibuat *hayu* (selamat ataupun bagus).

Kata *Memayu* bisa diartikan membuat ayu (*hayu*) yang memiliki arti mewujudkan kebagusan ataupun keselamatan di jagad raya atau memiliki sifat mengayomi (menaungi). Istilah *Memayu* bisa diketahui saat seseorang mendapatkan kesusahan, orang lain dapat memberikan pertolongan. Keikhlasan akan dijadikan titik utama untuk berkorban. *Bawana* dalam budaya Jawa tidak lain ialah jagad dan isinya, juga berkaitan dengan yang melahirkan jagad raya beserta isinya. *Bawana* bukan hanya bumi di mana manusia berpijak sekarang ini. *Bawana* dinilai menjadi daerah kosmos yang merupakan *jagad rame* yang dideskripsikan sebagaimana ladang, tanaman beserta

⁶⁸ Novrida Qudsi Lutfillah et al., "Konstruksi Tanggung Jawab Auditor Perspektif Mamayu Hayuning Bawana," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7003>.

⁶⁹ S. Endaswara, "*Memayu Hayuning Bawana: Laku Hidup Menuju Keselamatan Dan Kebahagiaan Hidup Orang Jawa*", 16.

tempat hidup sesudah mati. Maksudnya manusia yang hidup di *jagad rame* selama hidupnya melakukan banyak kebaikan yang nanti akan mendapat hasil yang baik pula.

Kaitan manusia dan *jagad rame* berdasarkan nilai MHB diartikan sebagai upaya membuat indah kehidupan dunia. Koentjaraningrat (1984) mengungkapkan bahwasanya manusia secara harfiah haruslah memelihara ataupun melakukan perbaikan terhadap lingkungannya.⁷⁰ Bila ditinjau secara abstrak, lingkungan yang harus dipelihara maupun diperbaiki ialah lingkungan spiritual, yaitu adat, cita-cita, tata cara, serta nilai budaya di masyarakat. MHB dipandang sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memicu terbentuknya perilaku ataupun sikap hidup seseorang yang mengutamakan kesesuaian antara sesama manusia, manusia dan Tuhannya, maupun manusia dan alam untuk melaksanakan kehidupan. Kedua anggapan tersebut mendorong bahwa manusia hidup tidak lepas dari yang mencipta *jagad rame*, tidak terlepas dari lingkungannya, sehingga manusia harusnya arif terhadap lingkungan, sebagai bentuk tanggung jawab mereka pada Sang Pencipta *jagad rame*.⁷¹

Raja mempunyai kekuasaan dalam melakukan tindakan apa pun guna kepentingan kerajaan ataupun semua isi di dalamnya baik harta benda serta kehidupan manusia. Namun, besarnya wewenang ataupun kekuasaan yang raja miliki pun diiringi dengan banyaknya kewajiban yang diemban olehnya. Kewajiban itu menjadi tuntutan kepada raja dalam bertindak adil dan bersikap bijak dalam melaksanakan pemerintahannya. Hal tersebut pada konsep kekuasaan Jawa dikenal sebagai konsep *keagunghinataraan*.⁷² Secara lengkap disebutkan sebagai *gung binathara bau dhendha nyakrawati* (sebesar kekuasaan dewa, penguasa dunia dan pemelihara hukum). Raja dianggap *wenang wisesa ing sanagari* (memiliki kekuasaan paling tinggi dalam penjuru negeri). Raja haruslah bijaksana

⁷⁰ Koentjoroningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 435.

⁷¹ Lutfillah et al., "Konstruksi Tanggung Jawab Auditor Perspektif Mamayu Hayuning Bawana."

⁷² G Moedjanto, "*Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*" (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 123.

(*wicaksana*), mempunyai sifat *ambeg adil para marta, berbudi bawa leksana* (sifat adilnya terhadap sesama dan meluap budi luhur-mulia), tugasnya menjaga keteraturan serta kesejahteraan hidup rakyat (*anjaga tata titi tentreming praja*), spaya terbentuk suasana aman dan sejahtera (*karta tuwin raharja*).⁷³ Dalam pengimplementasian falsafah *Memayu Hayuning Bawana* guna mewujudkan tanggungjawab kepada sang pencipta *jagad rame* (Tuhan), manusia (rakyat), dan alam atas pengeloaan aset kerajaan, raja membentuk lembaga kerajaan khusus untuk mengelola aset kerajaan, menempatkan pejabat yang sesuai dalam hal tersebut dan membuat kebijakan serta mekanisme yang tepat.



⁷³ Wuriyanto, “Gung Binatara: Kekuasaan Dan Moralitas Jawa,” 47–52.